25.01

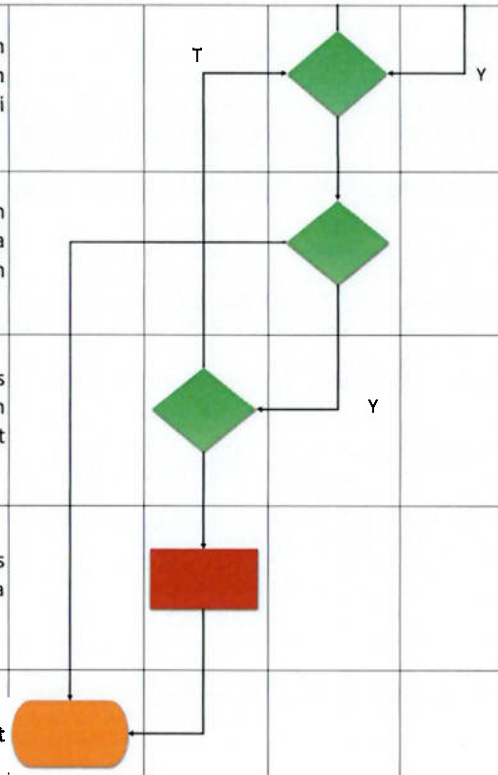
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	: AHU-240.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	: PERMOHONAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN PERORANGAN OLEH PEMILIK (SABH-PT)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8 Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai PT 2. Memahami ketentuan pemblokiran PT 3. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pendirian Perseroan Perorangan 2 SOP Perubahan Perseroan Perorangan 3 SOP Perbaikan Data Perseroan Perorangan 4 SOP Pembubaran Perseroan Perorangan 5 SOP Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Persekutuan Modal yang Terintegrasi dengan SABH AHU Online	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Persekutuan Komanditer 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
SOP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN PERORANGAN OLEH PEMILIK (SABH-PT)

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Dirjen AHU	Direktur Badan Usaha	Verifikator (Ketua Tim)	Konseptor (Anggota Tim)	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH-PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum www.ahu.go.id dengan mengisi form permohonan, serta mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan								Form permohonan, Dokumen pendukung	Kategori Pemohon: A.PEMILIK Dokumen Persyaratan: 1. Surat permohonan 2. FC Pernyataan Pendirian 3. Pernyataan Perubahan yang terakhir tercatat dalam SABH B. PERNAH TERCATAT SEBAGAI PEMILIK Dokumen Persyaratan: 1. Surat permohonan 2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Sengketa Terkait Kepemilikan Ataupun Sengketa Tata Usaha Negara Yang Berkaitan Dengan Pencatatan Kepemilikan Perseroan Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum; 2. Akta Perdamaian; 3. Penetapan Pencabutan Perkara; 4. Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; atau 5. Penetapan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, terkait sengketa kepemilikan Perseroan perorangan Tambahan Dokumen untuk Kuasa Pemohon : Surat Kuasa Pemohon yang dimuat dalam bentuk Akta Notaris
2	Memeriksa permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH-PT dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan. Jika tidak lengkap, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi				T		Form permohonan, Dokumen pendukung	3 (tiga) hari	Form permohonan dan dokumen pendukung lengkap	Melakukan telahaan awal Menentukan form pada setiap tahapan verifikasi
3	Memeriksa permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH-PT dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan			T			Form permohonan dan dokumen pendukung lengkap	3 (tiga) hari	Rekomendasi	Melakukan verifikasi dan koreksi telahaan dari anggota tim Dikembalikan ke Konseptor bila ada koreksi

4	Memeriksa permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH-PT dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan				Form permohonan dan dokumen pendukung lengkap	3 (tiga) hari	Hasil Rekomendasi	Dikembalikan ke Verifikator bila ada koreksi
5	Memberikan penolakan atas permohonan pemblokiran akses SABH-PT, serta menandatangani surat jawaban pemblokiran				Surat Jawaban Penolakan	3 (tiga) hari	Penolakan	Menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen
6	Memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH-PT, serta menandatangani surat jawaban pembukaan pemblokiran				Persetujuan atas permohonan	3 (tiga) hari	Persetujuan/ penolakan, Surat Jawaban	Menentukan form pada setiap tahapan verifikasi
7	Melakukan pembukaan pemblokiran akses PT pada Sistem Administrasi Badan Usaha dalam hal permohonan disetujui				Surat Jawaban Persetujuan	3 (tiga) hari	Persetujuan	Menentukan form pada setiap tahapan verifikasi
8	Menerima notifikasi dan mengunduh surat jawaban pembukaan pemblokiran akses PT				Notifikasi dan surat jawaban pemblokiran akses SABH-PT		Blokir Akses SABH-PT	buat format surat notifikasi